

JURNAL
POLITICO

**PATRONASE DAN KLIENTELISME PADA PEMILU LEGISLATIF 2014
(Analisis Strategi Pemenangan CALEG DPRD Propinsi Sulawesi Utara Periode 2014-2019)**

Franky RD Rengkung

PEMIKIRAN POLITIK ISLAM DALAM PROSES PENETAPAN UUD 1945

Burhan Niode

EKSISTENSI MILITER DALAM MENEGAKKAN DEMOKRASI INDONESIA DI ERA REFORMASI

Josef Kairupan

PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK

Tuerah A.M.R. Gosal

HUBUNGAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAH DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

Marlein T Lopian

DAMPAK PROGRAM PARIWISATA TERHADAP ORIENTASI SISTEM NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT

(Suatu Studi di Kawasan Lokasi Wisata Tasik Ria dan Sumaru Endo Kabupaten Minahasa)

Johannis E Kaawoan

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK

(Suatu Studi Di Kecamatan Sario Kota Manado)

Arie Junus Rorong

PERILAKU APARATUR PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PRESTASI KERJA

(Studi di Di Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan)

Sarah Sambiran

PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI KOTA MANADO

Johny P Lengkong

PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN

(Suatu Studi Pada Kehidupan Nelayan di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara)

Juliana W. Tumiwa



PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
MANADO

JURNAL POLITICO

PATRONASE DAN KLIENELISME PADA PEMILU LEGISLATIF 2014 (Analisis Strategi Pemenangan CALEG DPRD Propinsi Sulawesi Utara Periode 2014-2019) <i>Franky RD Rengkung</i>	1-15
PEMIKIRAN POLITIK ISLAM DALAM PROSES PENETAPAN UUD 1945 <i>Burhan Nioe</i>	16-27
EKSISTENSI MILITER DALAM MENEGAKKAN DEMOKRASI INDONESIA DI ERA REFORMASI <i>Josef Kairupan</i>	28-39
PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK <i>Tuerah A.M.R. Gosal</i>	40-46
HUBUNGAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAH DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN <i>Marlein T Lopian</i>	47-52
DAMPAK PROGRAM PARIWISATA TERHADAP ORIENTASI SISTEM NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT <i>(Suatu Studi di Kawasan Lokasi Wisata Tasik Ria dan Sumaru Endo Kabupaten Minahasa)</i> <i>Johannis E Kaawoan</i>	53-56
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK <i>(Suatu Studi Di Kecamatan Sario Kota Manado)</i> <i>Arie Junus Rorong</i>	57-64
PERILAKU APARATUR PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PRESTASI KERJA <i>(Studi di Di Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan)</i> <i>Sarah Sambiran</i>	65-74
PERANAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI KOTA MANADO <i>Johny P Lengkong</i>	75-86
PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN <i>(Suatu Studi Pada Kehidupan Nelayan di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara)</i> <i>Juliana W. Tumiwa</i>	87-100

JURNAL POLITICO

PELINDUNG

Dekan Fisip Unsrat

PENANGGUNG JAWAB

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan

PEMIMPIN REDAKSI

Drs Burhan Niode, MA

Wakil Pemimpin Redaksi

Drs. Jusuf Wowor, MSi

Dewan

Dr. Drs. Michael Mamentu, MA

Drs. Johnly Pangemanan, MSi

Efvendi Sondakh, SIP, MSi

Drs. Rivo Sumampouw, MSi

Maxi Egeten, SIP, MSi

Sekretariat

Trintje Lambey, SIP, MSi

J. Tompodung, SIP, MSi

Lay Out & Sirkulasi

Franky R.D Rengkung, SIP, MA

Hendra Pulukadang, SIP

Alamat :

Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado

Telp. 0431 – 862586 Kode Pos 95115

Email : politico.unsrat@yahoo.com

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
MANADO

DAFTAR ISI

Patronase Dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014

(Analisis Strategi Pemenangan CALEG DPRD Propinsi Sulawesi Utara Periode 2014-2019)

Franky RD Rengkung 1-15

Pemikiran Politik Islam Dalam Proses Penetapan UUD 1945

Burhan Niode 16-27

Eksistensi Militer Dalam Menegakkan Demokrasi Indonesia Di Era Reformasi

Josef Kairupan 28-39

Pendidikan Politik Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik

Tuerah A.M.R. Gosal 40-46

Hubungan Antara Kebijakan Pemerintah Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Marlien T Lopian 47-52

Dampak Program Pariwisata Terhadap Orientasi Sistem Nilai Sosial Budaya Masyarakat *(Suatu Studi di Kawasan Lokasi Wisata Tasik Ria dan Sumaru Endo Kabupaten Minahasa)*

Jahannis E Kaawoon 53-56

Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik

(Suatu Studi di Kecamatan Sario Kota Manado)

Arie Junus Rorang 57-64

Perilaku Aparatur Pemerintah Dalam Meningkatkan Prestasi Kerja

Sarah Sambiran 65-74

Peranan Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Kota Manado

Johny P Lengkong 75-86

Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan

(Suatu Studi Pada Kehidupan Nelayan Di Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara)

Juliana W Tumiwa 87-100

**PERAN PEMERINTAH DALAM
MENANGGULANGI KEMISKINAN
(Suatu Studi Kehidupan Nelayan Di
Kecamatan Likupang Barat Kabupaten
Minahasa Utara)**

OLEH : JULIANA W TUMIWA

ABSTRAK

Kecamatan Likupang barat, telah ditemukan permasalahan yang kompleks yang berkaitan dengan kemiskinan nelayan, antara lain bahwa pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan bagi masyarakat nelayan, belum dapat menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat. Paket pemberian modal usaha seringkali tidak kena sasaran disebabkan karena program tersebut hanya bersifat sementara, karena sasaran program hanya mengurangi beban penduduk dari garis kemiskinan, sementara yang diharapkan adalah modal sosial dalam kesinambungan hidup mereka hingga mereka mampu mandiri, minimnya tingkat pendapatan nelayan yang disebabkan oleh akses produksi, peralatan masih bersifat sederhana, jangkauan usaha terbatas karena dipengaruhi oleh sarana dan prasarana tangkapan yang relatif kecil/minim, akses pasar masih dikuasai oleh para tengkulak yang disebabkan oleh besarnya ketergantungan nelayan, Sikap mental nelayan yang konsumtif, membuat mereka tak mampu meningkatkan usahanya. Selain itu dipengaruhi pula oleh latar belakang pendidikan rendah serta faktor sosial budaya masyarakat terutama yang berkaitan dengan tradisi menangkap ikan melalui warisan nenek moyang mereka, minimnya masyarakat nelayan dalam mengakses informasi yang berkaitan dengan peningkatan usaha.

Kata Kunci : Peran, Pemerintah, Kemiskinan, Nelayan

PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan nelayan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh, dan bukan solusi secara parsial (Suharto, 2005). Oleh karena itu, harus diketahui akar masalah yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan pada nelayan. Terdapat beberapa aspek yang menyebabkan terpeliharanya kemiskinan nelayan atau masyarakat pinggiran pantai, diantaranya; peran pemerintah yang tidak memihak masyarakat miskin, banyak program terkait dengan penanggulangan kemiskinan bersifat top down dan selalu menjadikan masyarakat sebagai objek, bukan subjek. Kondisi bergantung pada musim sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan nelayan, terkadang beberapa pekan nelayan tidak melaut dikarenakan musim yang tidak menentu. Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan peralatan yang digunakan nelayan berpengaruh pada cara dalam menangkap ikan, keterbatasan dalam pemahaman akan teknologi, menjadikan kualitas dan kuantitas tangkapan tidak mengalami perbaikan.

Kondisi lain yang turut memperburuk tingkat kesejahteraan nelayan adalah mengenai kebiasaan atau pola hidup. Kendalanya adalah pola hidup konsumtif, dimana pada saat penghasilan banyak, tidak ditabung untuk persiapan paceklik, melainkan dijadikan kesempatan untuk membeli kebutuhan sekunder. Namun ketika paceklik, pada akhirnya nelayan harus berhutang, termasuk kepada lintah darat, yang justru semakin memperberat kondisi mereka

Deskripsi diatas merupakan pusran masalah yang terjadi pada masyarakat nelayan umumnya di Indonesia.

Masalah kemiskinan nelayan sebagaimana dikemukakan diatas juga dapat dijumpai pada masyarakat nelayan khususnya diwilayah Kecamatan Likupang Barat, asumsi

yang dapat menyebabkan kemiskinan bagi masyarakat nelayan di wilayah ini sangat terkait dengan berbagai kendala antara lain belum adanya kebijakan dan aplikasi pembangunan kawasan pesisir dan masyarakat nelayan yang terintegrasi atau terpadu di antara para pelaku pembangunan, belum adanya konsistensi kuantitas produksi (hasil tangkap) sehingga aktivitas sosial ekonomi perikanan di desa-desa nelayan tidak dapat berlangsung secara terus menerus berkaitan dengan hal tersebut maka masalah isolasi geografis desa nelayan, juga seringkali menjadi kendala sehingga menyulitkan keluar masuk barang, jasa, kapital, dan manusia dan ini tentu akan berpengaruh terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat nelayan. Selain itu adanya keterbatasan modal usaha atau investasi tentu akan berpengaruh pada nelayan dalam meningkatkan kegiatan ekonomi perikananannya, dan akhirnya sangat berpengaruh pada tingkat pendapatan rumah tangga nelayan, serta berdampak pada sulitnya peningkatan skala usaha dan perbaikan kualitas hidup bagi mereka. Rendahnya pendapatan nelayan secara langsung juga akan berdampak pada tingkat kesejahteraan sosial nelayan yang rendah sehingga mempengaruhi mobilitas sosial mereka, dan lemahnya prakarsa masyarakat nelayan dalam berbagai akses pembangunan.

TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- Mengetahui peranan Pemerintah dalam menanggulangi Kemiskinan bagi masyarakat Nelayan
- Mengetahui berbagai usaha yang dilakukan oleh Pemerintah dalam kaitan dengan program Pemberdayaan bagi masyarakat Nelayan Miskin
- Memberikan gambaran tentang Faktor-faktor yang berkaitan dengan

tingkat kemiskinan masyarakat Nelayan

METODE PENELITIAN

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat nelayan yang ada di Kecamatan Likupang Barat. Jumlah desa yang ada di Kecamatan likupang barat adalah berjumlah 17 Desa. Untuk penentuan sampel desa maka ditetapkan sebanyak 6 Desa sampel yakni Desa Termaal, Tarabitan, Gangga I, Gangga II, Desa Bangka dan Desa Palaes, tiap desa sampel dapat ditetapkan sebanyak 10 orang sehingga jumlah responden ditetapkan sebanyak 60 responden.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, karena penulis ingin mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi sosial yang berhubungan dengan peran pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat nelayan di Kecamatan Likupang barat. Jenis penelitian ini berpegang pada pendapat Masri Singarimbun dan effendi (2003: 4 – 5) bahwa Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk pengukuran terhadap fenomena social tertentu, melalui pengembangan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Selain itu penulis mengambil pendapat dari Adi Suryasubrata (2001: 18) yang mengemukakan bahwa tujuan dari penelitian Deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian ini maka terdiri atas dua variable yaitu variable bebas dan variable terikat. Variabel bebas (Independen variable) Peran pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan nelayan, sedangkan yang menjadi variable dependen adalah karakteristik dan

pola kehidupan nelayan. Peran pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan adalah suatu upaya pemerintah yang dapat memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat nelayan. Sedangkan karakteristik dan pola kehidupan masyarakat adalah suatu bentuk dan aktivitas masyarakat nelayan kaitan dengan pola hidup, pengembangan pengetahuan, melalui tingkat pendidikan, pengembangan usaha, ketrampilan dan aspek permodalan.

Cara pengumpulan data dapat digunakan dalam dua bentuk yaitu melalui pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer akan diperoleh dari hasil responden sedangkan cara pengumpulan data sekunder yaitu melalui data dari Desa-desa yang ada serta data Monografi kecamatan sebagai data penunjang.

Teknik Analisis Data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1). Penelitian data dapat dilakukan dengan prinsip validitas dan obyektivitas dengan cara mengkategorikan data
- 2). Pengolahan dan Analisis Data yang dilakukan dengan cara :
 - a. Data yang bersifat Kualitatif akan dipisah-pisahkan menurut Kategori, kemudian dikuantifikasikan dihitung prosentasenya serta ditafsirkan dengan analisis kualitatif,
 - b. Data yang bersifat kuantitatif akan diproses dengan cara pengklasifikasian dan dihitung prosentasinya lalu dilakukan penafsiran dalam bentuk deskriptif sebagaimana lasimnya dalam penelitian Deskriptif.
 - c. Interpretasi hasil analisis data akan dilakukan sesuai dengan pokok bahasan dari masing-masing konsep dan variable yang akan dibahas,

- d. Setelah dilakukan proses pembahasan dan analisis data maka langkah terakhir penulis akan menyajikan kesimpulan dan saran dari hasil kajian penelitian

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Karakteristik kehidupan masyarakat Nelayan

Secara umum, kemiskinan masyarakat pesisir disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, antara lain kebutuhan akan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, infrastruktur. Di samping itu, kurangnya kesempatan berusaha, kurangnya akses terhadap informasi, teknologi dan permodalan, budaya dan gaya hidup yang cenderung boros, menyebabkan posisi tawar masyarakat miskin semakin lemah. Pada saat yang sama, kebijakan Pemerintah selama ini kurang berpihak pada masyarakat pesisir sebagai salah satu pemangku kepentingan di wilayah pesisir.

Untuk melihat bagaimana karakteristik masyarakat nelayan khususnya diwilayah Kecamatan Likupang barat , maka akan dapat dibahas sebagai berikut :

1. Tingkat Pendidikan masyarakat nelayan.

Masalah pendidikan bagi masyarakat nelayan adalah merupakan masalah yang pelik yang lazim dihadapi oleh masyarakat nelayan secara umum. Rendahnya tingkat pendidikan bagi masyarakat nelayan akan dapat berdampak pada kualitas hidup bagi masyarakat nelayan antara lain berpengaruh terhadap tingkat pendapatan, serta tingkat kesejahteraan keluarga nelayan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat nelayan di wilayah Kecamatan Likupang barat 51,67 % didominasi oleh latar belakang pendidikan SLTP.

Dengan latar belakang pendidikan yang rendah tentu akan berdampak pada aktivitas bagi masyarakat nelayan. Secara

umum nelayan yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah adalah terdapat pada nelayan yang miskin.

Nelayan yang miskin umumnya belum banyak tersentuh teknologi modern, kualitas sumber daya manusia rendah dan tingkat produktivitas hasil tangkapannya juga sangat rendah. Tingkat pendidikan nelayan berbanding lurus dengan teknologi yang dapat dihasilkan oleh para nelayan, dalam hal ini teknologi di bidang penangkapan dan pengawetan ikan. Ikan cepat mengalami proses pembusukan dibandingkan dengan bahan makanan lain disebabkan oleh bakteri dan perubahan kimiawi pada ikan. Oleh karena itu, diperlukan teknologi pengawetan ikan yang baik. Selama ini, nelayan hanya menggunakan cara yang tradisional untuk mengawetkan ikan. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan penguasaan nelayan terhadap teknologi.

Dukungan pemerintah dan pihak lain sangat dibutuhkan, karena kelemahan utama nelayan Indonesia di banding nelayan bangsa lain adalah masalah pemanfaatan teknologi, akses informasi mengenai titik-titik keberadaan ikan tidak dimiliki oleh nelayan, sehingga jumlah tangkapan nelayan selalu terbatas. Nelayan perlu diedukasi untuk mampu memahami sistem teknologi satelit atau GPS, setidaknya walaupun tidak mampu menggunakan teknologinya, nelayan dibukakan akses informasinya, baik dari pihak DKP, BMG maupun syahbandar, sebagai pengelola kegiatan nelayan di tingkat lokal. Selain itu dalam peningkatan kualitas ikan, dukungan dari pengusaha atau pihak akademik mengenai teknologi pengawetan, pengemasan harus diberikan, agar harga ikan yang nelayan jual tidak mengalami kejatuhan.

Dukungan akan peningkatan pendidikan tidak semata kepada nelayan sebagai kepala keluarga, melainkan nelayan dalam konteks keluarga. Keterbatasan

pengetahuan terkadang terjadi karena sifatnya turun temurun, dimana orang tua tidak mengharuskan anaknya untuk melanjutkan sekolah.

Keterbatasan keluarga nelayan dalam mengakses pendidikan dasar yang bersifat formal maupun pendidikan lain yang sifatnya informal harus ditingkatkan, pemangku kepentingan harus memprioritaskan akan hal ini dengan membangun fasilitas pendidikan di dekat pemukiman nelayan, membangun akses parsara, seperti jalan. Selain memberikan variasi pilihan pendididak baik formal maupun informal, hingga penyelenggaraan setara paket A, B dan C. Jika kondisi pendidikan pada anak nelayan jauh lebih baik, minimal memenuhi pendidikan dasar bahkan menengah, akan memudahkan nelayan tersebut dalam memanfaatkan tehnologi juga perkembangan informasi lainnya.

2. Pola Hidup Masyarakat Nelayan.

Masyarakat nelayan secara umum memiliki pola hidup yang sangat berbeda bila dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Hal ini ditandai dengan minimnya akses produksi, minimnya permodalan, kekurangan fasilitas dalam hal melaut, serta dipengaruhi oleh faktor sosial budaya serta tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka secara turun temurun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden menjawab (95,00%) adalah kurang baik. Hal ini ditandai dengan sikap boros, pola hidup konsumtif, malas, memiliki ketergantungan dengan tradisi yang sangat kuat.

Streotype seperti boros dan malas oleh berbagai pihak sering dianggap menjadi penyebab kemiskinan nelayan. Padahal kultur nelayan jika dicermati justru memiliki etos kerja yang handal. Sebagai contoh, mereka pergi subuh pulang siang, bahkan pada masa tertentu nelayan terpaksa harus beberapa hari dilaut dan menjual ikan hasil tangkapan dilaut

melalui para tengkulak yang menemui mereka ditengah laut, kemudian menyempatkan waktu pada waktu senggang untuk memperbaiki jaring. Memang ada sebagian nelayan yang mempunyai kebiasaan dan budaya boros dan lupa akan kondisi ketika mengalami kesusahan.

Perlu adanya upaya merubah cara berpikir nelayan dan keluarganya, terutama mengenai kemampuan dalam mengelola keuangan disesuaikan dengan kondisi normal dan paceklik, selain mencari alternatif aktivitas disaat kondisi cuaca tidak menentu. Bahwa musim paceklik akan hadir dalam setiap tahunnya, oleh karenanya berbagai strategi adaptasi dilakukan masyarakat nelayan untuk bertahan hidup. Strategi adaptasi yang biasanya dilakukan adalah memobilisasi peran perempuan (kaum istri) dan anak-anaknya untuk mencari nafkah. Keterlibatan perempuan dalam mencari nafkah untuk keluarga di wilayah pesisir atau desa-desa nelayan tidak terlepas dari sistem pembagian kerja secara seksual (*the division of labour by sex*) yang berlaku pada masyarakat setempat.

3. Kondisi Alam

Kompleksnya permasalahan kemiskinan masyarakat nelayan terjadi disebabkan masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang keras yang selalu diliputi ketidakpastian (*uncertainty*) dalam menjalankan usahanya. Musim paceklik yang selalu datang tiap tahunnya dan lamanya pun tidak dapat dipastikan akan semakin membuat masyarakat nelayan terus berada dalam lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle*) setiap tahunnya.

Tidak ada yang bisa dilakukan dalam menghadapi kondisi alam, karena alam tidak akan bisa dilawan. Hal yang bisa dilakukan dalam menghadapinya adalah perlunya masyarakat nelayan memiliki penguasaan aspek informasi dalam hal cuaca dan lokasi.

Nelayan di berbagai wilayah membutuhkan dukungan yang kongkrit dari berbagai pihak mengenai prediksi cuaca dan di lokasi mana berkemungkinan terjadi cuaca ekstrim, sehingga resiko di laut dapat dihindari, dan alternatif wilayah tangkapan yang relatif aman didapatkan. Perlunya kerjasama antara Departemen Kelautan dan Perikanan dengan pihak Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) mengenai perkiraan cuaca dalam jangka waktu yang bersifat menengah maupun panjang, sehingga nelayan di masing-masing daerah sudah bisa memprediksikan kondisi cuaca. Dengan demikian waktu tangkap dan lokasi tangkap sudah bisa nelayan rencanakan sebelum melaut. Jika kondisi tersebut terwujud, nelayan bisa menentukan waktu, kapan mereka harus optimal menangkap ikan, harus menabung untuk persiapan paceklik, dan kapan mereka harus merawat perlengkapan tangkap ikan disaat memanfaatkan kondisi cuaca paceklik. Sosialisasi mengenai perkembangan cuaca beserta prediksinya dapat menggunakan pertemuan kelompok nelayan. Pemberian informasi mengenai perkembangan cuaca beserta dasar prediksinya merupakan asupan berharga bagi masyarakat nelayan, karena akan menjadi keuntungan bagi nelayan disamping mereka memahami ilmu kebaharian tradisional yang sifatnya turun temurun yang terus dilestarikan, juga pemahaman dasar mengenai kondisi cuaca berdasarkan informasi berdasarkan pemanfaatan akan teknologi.

Terlepas dari kondisi alam yang terjadi diwilayah penelitian menunjukkan bahwa akses untuk penguasaan sumberdaya dapat dikatakan masih sangat terbatas. Keterbatasan ini dipengaruhi oleh jangkauan usaha mereka seperti masih menggunakan dayung sehingga akan mempengaruhi hasil tangkapan mereka. Hasil penelitian tentang bagaimana pernyataan masyarakat nelayan tentang kondisi alam yang ada diwilayah

mereka hasil penelitian membuktikan bahwa kondisi alam yang ada khususnya bagi masyarakat nelayan yang melakukan aktivitasnya di wilayah Kecamatan likupang barat 53,33 % menyatakan cukup mendukung. Hal ini berkaitan dengan potensi alam yang tersedia terutama sumberdaya ikan masih sangat melimpah namun yang menadi permasalahan adalah system alat tangkap yang digunakan masih sangat sederhana.

4. Kondisi Alat Tangkap dan Pemasaran hasil tangkapan

Masyarakat nelayan dalam melaksanakan aktivitasnya terutama dalam hal melaut secara umum masih menggunakan alat tangkap secara tradisional yang diwariskan oleh nenek moyang mereka sejak turun temurun. Hal ini ditandai dengan alat transportasi dengan menggunakan perahu londe dengan bantuan alat dayung, kail yang digunakan untuk memancing sangat sedikit, serta masih mempertahankan tradisi dalam menangkap ikan. Dengan keterbatasan peralatan yang sangat sederhana tersebut membuat nelayan memperoleh hasil tangkapan sangat sedikit bahkan seringkali tidak cukup memenuhi kebutuhan keluarga.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa system peralatan yang dimiliki bagi masyarakat nelayan yang melakukan aktivitasnya di wilayah Kecamatan Likupang Barat 90,00 % adalah menggunakan dayung ,perahu londe.

Masalah peralatan yang sederhana tentunya akan mempengaruhi jangkauan untuk mencari ikan, oleh karena itu masyarakat nelayan apabila mencari ikan yang lebih banyak mereka tak mampu bersaing dengan nelayan-nelayan yang memiliki fasilitas yang memadai, akibatnya hasil produksi yang didapat sangat sedikit. Kemudian hasil panen yang didapat tidak dijual secara langsung ditempat pelalangan melainkan dijual kepada masyarakat yang

terdekat. Seringkali kalau penjualan ikan tidak dijual ditempat pelalangan ikan (TPI) maka secara langsung harga ikan akan turun, sedangkan kalau dijual melalui tempat pelalangan ikan sudah tentu akan mendapatkan harga yang layak.

Sudah barang tentu tidak semua daerah pesisir memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Hal tersebut membuat para nelayan terpaksa untuk menjual hasil tangkapan mereka kepada tengkulak dengan harga yang jauh di bawah harga pasaran. Kondisi ini yang selalu mengakibatkan nelayan tidak pernah untung, keterbatasan infrastruktur menjadikan nelayan merugi, tidak seimbang antara biaya yang dikeluarkan untuk melaut, dengan keuntungan hasil jual, karena harga dipermainkan oleh pihak tengkulak.

Upaya yang mungkin dilakukan agar nelayan tidak terjerat lingkaran tengkulak adalah dengan mengembangkan fungsi lembaga keuangan mikro dan koperasi yang memihak nelayan, selain itu perlu adanya upaya membangun usaha bersama, seperti melalui pemilikan sarana-sarana penangkapan dan pemasaran secara kolektif.

Selain itu kebudayaan nelayan yang berbahaya namun terabaikan adalah terjalannya relasi sosial ekonomi yang sifatnya eksploitatif dengan pemilik perahu dan pedagang perantara (tengkulak) dalam kehidupan masyarakat nelayan. Kondisi tersebut bisa diperbaiki dengan mengurangi beban utang piutang yang kompleks para nelayan kepada pemilik perahu dan tengkulak dengan mencari alternatif keuangan mikro. Harus adanya upaya dalam memperbaiki norma sistem bagi hasil dalam organisasi penangkapan, sehingga tidak merugikan nelayan. Selain itu perlu mengoptimalkan peran lembaga ekonomi lokal, seperti KUD Mina.

Disisi lain rendahnya tingkat pendapatan rumah tangga nelayan,

berdampak sulitnya peningkatan skala usaha dan perbaikan kualitas hidup, upaya yang bisa dilakukan adalah meningkatkan pemilikan lebih dari satu jenis alat tangkap, agar bisa menangkap sepanjang musim, mengembangkan diversifikasi usaha berbasis bahan baku perikanan atau hasil budidaya perairan, seperti rumput laut, memperluas kesempatan kerja sektor off fishing dan melakukan transmigrasi nelayan pada wilayah lain yang masih memiliki potensi kelautan.

Namun yang menjadi masalah adalah tidak semua nelayan memiliki perahu sendiri. Nelayan yang tidak mempunyai modal untuk membeli perahu, terpaksa meminjam uang kepada tengkulak. Pada umumnya para tengkulak (patron) memberikan pinjaman kalau hasil tangkapan nelayan (klien) minim. Ketergantungan nelayan padatengkulak berawal dari utang/pinjaman, dan biasanya dilakukan pada saat paceklik atau memperbaiki kerusakan alat tangkap seperti jaring dan mengganti tali kajar. Meskipun demikian, ada juga pihak yang menilai bahwa keberadaan para tengkulak tersebut justru menolong nelayan. Kondisi ini terjadi karena negara tidak mampu memberikan pinjaman lunak, dan walaupun ada bank, mereka juga tidak bisa mengaksesnya karena alat tangkap sebagai faktor produksi tidak bisadijadikan agunan.

Dalam perspektif struktural kemiskinan nelayan tidak hanya disebabkan hubungan patron-klien yang menimbulkan jeratan utang dan mengarah pada bentuk eksploitasi. Tetapi kemiskinan nelayan juga terjadi karena keterbatasan akses nelayan terhadap hak penguasaan sumberdaya perikanan. Penguasaan atas sumberdaya perikanan selama ini lebih banyak dinikmati oleh kolaborasi pemilik modal dan birokrat. Sebagai fakta adalah masih beroperasinya pukat harimau (*trawl*) di seluruh perairan Indonesia yang berakibat pada penyerobotan

terhadap wilayah tangkap nelayan tradisional (*traditional fishing ground*).

Bahkan adanya musim-musim tertentu dimana ikan jenis tertentu banyak dan sedikit menggambarkan bahwa kehidupan mereka tergantung pada rejeki laut. Dalam satu daerah dimana terdapat desa-desa pesisir juga memiliki perbedaan dalam tingkat kesurplusan sumberdaya perikanan. Bahkan ukuran rumah yang terbuat dari bilik bambu dan sudah condong belum tentu bisa menjadi ukuran miskin karena mungkin saja ditemukan barang elektronik seperti TV. Pola hubungan patron klien memungkinkan mereka berutang dalam artian digunakan pada tujuan yang baik maupun tidak semisal membeli suatu barang berharga di rumah. Sehingga tak heran jika, umumnya nelayan berenang dalam kubangan utang. Penghasilan Rp.175.000/bulan tidaklah susah diperoleh ketika musim ikan banyak. Bahkan bisa tiga kali lipat, sekalipun dengan sistem bagi hasil dengan tokehnya. Tapi besoknya, mungkin hanya dapat Rp.10.000, lalu kemudian meminjam ke tokeh, begitu seterusnya.

Namun berdasarkan pandangan nelayan (perspektif *emic*), kuatnya pola patron-klien di masyarakat nelayan disebabkan oleh kegiatan perikanan yang penuh resiko dan ketidakpastian sehingga tidak ada pilihan lain bagi mereka selain bergantung pada pemilik modal (patron). Dari hal tersebut, bisa dibayangkan apa yang akan diterima para nelayan dengan sistem yang demikian, sehingga sangatlah wajar jika kemiskinan menjadi bagian yang akrab dalam kehidupan mereka.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan nelayan

Dalam konteks Negara berkembang seperti Indonesia, program penanggulangan kemiskinan masih merupakan salah satu program pemerintah bahkan masih mendapatkan prioritas. Dengan krisis ekonomi yang berkepanjangan terutama krisis

global yang masih melanda saat ini akan membawa dampak yang semakin berat pada kehidupan masyarakat lapisan bawah dan keluarga miskin, sehingga semakin sulit untuk mengentaskan kemiskinan dari berbagai permasalahan kemiskinan.

Walaupun pemerintah sudah berupaya mengurangi beban penduduk dari kemiskinan namun kemiskinan tetap masih menjadi program/ prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan ,khususnya dalam pelaksanaan pembangunan Daerah. Sebab diakui bersama bahwa program penanggulangan kemiskinan disuatu daerah tidaklah sama dengan program yang dilaksanakan di daerah lainnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara sudah berupaya melaksanakan pembangunan Daerah terutama melalui penyediaan Infra Struktur. Kemajuan pembangunan melalui infra struktur atau pembangunan fisik belum menjadi jaminan bahwa pemerintah akan mampu mengurangi beban penduduk/masyarakat nelayan dari tingkat kemiskinan. Data kemiskinan di Kabupaten Minahasa Utara yaitu 12.28. % . Kemajuan pesat yang di capai melalui pembangunan Daerah dapat dilihat semakin tumbuhnya sentra-sentra ekonomi melalui kawasan Pembangunan ,terutama prioritas untuk kawasan investasi yang menggerakkan aktifitas jasa, perdagangan.

Nampaknya dengan melihat struktur perekonomian maupun tingkat pertumbuhan ekonomi diwilayah ini yang dilihat dari hasil PDRB, yang begitu membaik dengan prioritas pembangunan fisik, tidak akan berpengaruh terhadap tingkat perekonomian penduduk khususnya masyarakat nelayan miskin akan mengalami peningkatan terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok. Buktinya sampai saat ini masih banyak masyarakat nelayan miskin yang masih membutuhkan berbagai kebijakan serta jalan keluar dalam mengatasi masalah kemiskinan. Dari berbagai alasan yang dikaji dilapangan menunjukan bahwa ada beberapa faktor yang turut mempengaruhi tingkat kemiskinan bagi masyarakat nelayan khususnya diwilayah Kecamatan Likupang barat antara lain : Kurangnya kesempatan kerja, Rendahnya

Tingkat Pendidikan, Rendahnya Tingkat Pendapatan, Kurangnya ketrampilan dan keahlian masyarakat nelayan miskin dalam mengembangkan kewirausahaan, minimnya permodalan , dan kurangnya kepedulian pemerintah terhadap masyarakat nelayan . Faktor-faktor tersebut diatas secara langsung akan turut menentukan tingkat kemiskinan bagi masyarakat nelayan didaerah pedesaan.

1. Faktor Kesempatan Kerja .

Bekerja adalah cara terbaik untuk menekan krisis didalam keluarga. Hal ini sangat erat kaitannya dengan jumlah orang yang bekerja dalam sebuah keluarga. Pada tahun 1988 ,angka kemiskinan untuk keluarga yang tidak ada yang bekerja sekitar 29,8 %, sementara angka kemiskinan untuk keluarga dimana tiga atau lebih dari anggota keluarganya yang bekerja adalah 2,2 %. (Sherraden,2006). Pekerjaan merupakan sebuah kontribusi terhadap pendapatan. Seseorang yang akan bekerja tentu ia akan mampu memenuhi kebutuhan pokok dari hasil pendapatannya. Apabila orang atau penduduk tidak mendapatkan pekerjaan, maka kemungkinan besar akan berdampak pada menurunnya konsumsi, kebutuhan pokok serta besarnya pengeluaran, bahkan yang lebih para lagi besarnya ketergantungan terhadap hutang. Kesempatan kerja menjadi pokok perhatian pemerintah ,karena tanpa adanya kesempatan kerja,maka tidak akan ada investasi ataupun tambahan pendapatan bagi keluarga. Dengan demikian faktor kesempatan kerja memiliki hubungan yang sangat positif dengan tingginya angka kemiskinan. Meningkatnya kesempatan kerja akan dapat menekan laju tingkat kemiskinan, dan mengatasi besarnya pengangguran. Apakah bagi masyarakat nelayan miskin masalah kesempatan kerja dan pengangguran akan menjadi penentu akan tingkat kesejahteraan. Kesempatan kerja yang lebih besar akan mengurangi atau menurunkan angka pengangguran selanjutnya

meningkatnya pengangguran karena disebabkan oleh tidak adanya kesempatan kerja.

Dengan demikian kesempatan kerja menjadi indikator penting dalam sebuah keluarga khususnya bagi masyarakat nelayan miskin. Orang miskin biasanya akan selalu bekerja karena tanpa mereka bekerja maka mereka tidak akan makan hari ini. Oleh karena itu bagi orang miskin bekerja juga menjadi sebuah asset untuk menyambung hidup. Banyak masyarakat nelayan miskin diwilayah pedesaan yang bekerja tetapi tanpa mendapatkan upah walaupun terdapat upah maka upah yang didapat adalah hasil pekerjaan dari membersihkan kebun, memanjat kelapa, menggali sumur, membuat rumah, mencuci pakaian dan lain-lain. Sedangkan diwilayah perkotaan bagi penduduk yang bekerja maka mau tidak mau harus diberi upah. Upah menjadi sebuah jaminan bagi penduduk miskin entah dinilai dengan standar yang lebih tinggi atau sebaliknya. Berdasarkan data tentang kondisi social ekonomi tahun 2009 yang diturunkan oleh Bappeda maka jumlah angkatan kerja mencapai 1.368 orang sementara tingkat pengangguran terbuka sekitar 14,97 %. Tingginya angka pengangguran penduduk tersebut diatas tentu akan mempengaruhi angka kemiskinan dimana untuk Kabupaten Minahasa Tenggara meningkat menjadi 5,56 % sedangkan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik yaitu sekitar 8,18 %. Seharusnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan diikuti oleh menurunnya golongan penduduk miskin khususnya bagi masyarakat nelayan miskin. Dari hasil tersebut diatas menunjukkan bahwa kemiskinan dan pengangguran akan selalu meningkat walaupun dengan pertumbuhan ekonomi secara makro meningkat. Hal ini tentu ada hubungannya dengan kepedulian pemerintah bagi nelayan miskin. Salah satunya adalah kebijakan terhadap peningkatan kesempatan

kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah kesempatan kerja masih masalah yang krusial terbukti 73,33 % responden menjawab bahwa masyarakat nelayan menyatakan jarang atau kadang-kadang mendapatkan kesempatan kerja.

2. Faktor Pendapatan.

Pendapatan menurut Sherraden (2006) merupakan semua uang yang masuk dalam sebuah rumahtangga atau unit keluarga terkecil lainnya dalam suatu masa tertentu. Ini disebut arus mengalirnya uang. Dalam beberapa tahun terakhir ,kita telah belajar bahwa rendahnya pendapatan bagi mayoritas penduduk atau rumahtangga bersifat dinamis. Artinya pendapatan seseorang bisa dinilai berdasarkan mata pencaharian, atau pekerjaan utama, kalau pegawai ada kategori golongan, bagi nelayan maka ada nelayan pemilik ada nelayan buruh, begitupun dengan petani maka ada petani penggarap dan ada petani pemilik,dalam buruh bangunan ada buruh yang bekerja sebagai Bas dan ada buruh yang bekerja sebagai Knek biasanya mereka ini memiliki tingkat upah yang berbeda. Pada jaman sekarang Pekerja buruh sebagai Bas dibayar dengan upah Rp. 75.000-Rp. 100.000/hari sedangkan bagi knek buruh bangunan maka mereka diberikan upah sebesar Rp. 35.000 – Rp. 50.000/hari. Sebenarnya bila dilihat dari tingkat atau standar harga pekerja buruh sudah maksimal yakni sudah melebihi standar UMP. Tetapi pekerja buruh ini biasanya tidak tetap dalam sebulan terkadang bekerja hanya 2 minggu ataupun hanya bekerja satu minggu,sehingga tidak taksiran pendapatan bagi seorang buruh dianggap relatif . Begitu pula dengan mata pencaharian sebagai nelayan, tergantung dari besarnya nelayan menangkap dan mendapatkan pembagian yang dinilai dengan uang. Mata pencaharian sebagai nelayan biasanya sangat rentan dengan kondisi alam , apabila air laut sangat tenang maka akan

memberi peluang bagi nelayan untuk dapat bertahan hidup atau memperoleh pendapatan, tetapi apabila terjadi musim ombak maka para nelayan akan menganggur. Pengangguran dari masyarakat nelayan, petani, maupun yang bekerja sebagai buruh dan sektor informal tentu merupakan masalah bagi sebuah rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok. Sebab pemenuhan kebutuhan pokok bukan saja dilihat dari persoalan apakah akan makan hari ini, tetapi ada kebutuhan lainnya yang harus diperlukan seperti membayar uang sekolah anak-anak, membeli seragam, membeli keperluan rumah tangga lainnya, membeli radio, peralatan untuk mata pencaharian misalnya bagi nelayan akan membeli kail, snar, pancing, maupun berbagai keperluan yang berkaitan dengan asset mata pencaharian sebagai nelayan. Sedangkan bagi petani penyisihan uang juga dianggap penting untuk membeli pupuk, cangkul, parang, obat-obat untuk hama, serta bibit yang diperlukan untuk tanaman. Dengan demikian dalam menentukan kategori pendapatan sangatlah bervariasi karena ukuran dan penilaian bagi suatu wilayah atau kawasan tertentu sangat berbeda dengan ukuran dan penilaian pendapatan di daerah lainnya. Terkadang para ahli menilai tingkat pendapatan seseorang hanya taksiran dengan nilai Rupiah dalam setiap bulan, minggu ataupun harian. Tetapi tidak menggali secara lebih dalam mengapa tingkat pendapatan bagi seorang nelayan itu sangat rendah. Mungkin bagi nelayan yang bersangkutan hasil produksi tangkapannya sangat sedikit karena menggunakan dayung, alat pancing yang digunakan sangat sederhana, ataupun sebaliknya bila produksi besar didapat seringkali harga jual sangat murah, sehingga mempengaruhi besarnya pendapatan seseorang. Bagi pedagang atau tibo-tibo biasanya hasil pendapatan diperoleh dari keuntungan dari hasil penjualan dan dipotong dengan modal usaha jadi sangat

sederhana untuk menentukan hasil pendapatan minimal seseorang. Bagi ibu rumah tangga terutama dalam mencuci pakaian, memasak, dapat dinilai dengan standar rupiah sebesar Rp. 10.000 - Rp. 15.000 dalam setiap hari. Berarti dalam sebulan bisa mencapai besarnya pendapatan Rp. 400.000.- Standarisasi pendapatan memang sangat penting untuk menentukan miskin tidaknya seseorang. Dinas Statistik Kabupaten Minahasa Utara tahun 2008-2009 mematok hasil pendapatan penduduk yang dapat dikategorikan miskin adalah dibawah Rp. 500.000.-/Bulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan golongan masyarakat nelayan miskin dilokasi penelitian ternyata 75,00 % memiliki tingkat pendapatan Rendah, atau golongan yang menerima pendapatan dalam setiap bulan berkisar Rp. 100.000-Rp. 295.000 /bulan, 20,00 % masyarakat nelayan memiliki tingkat pendapatan sedang atau golongan masyarakat nelayan yang menerima pendapatan dalam setiap bulan berkisar Rp. 300.000 – Rp. 500.000.- /Bulan dan 5,00 % masyarakat nelayan memiliki pendapatan yang tinggi atau golongan masyarakat nelayan yang menerima pendapatan dalam setiap bulan yakni lebih dari Rp. 500.000/bulan. Memang dalam menilai penduduk dari garis kemiskinan dari pendapatan minimal seseorang belumlah seragam, hal ini disebabkan karena kriteria pendapatan dari pekerjaan tertentu sangatlah beragam dan bervariasi tergantung dari mata pencaharian pokok apakah sebagai nelayan, buruh kasar, pekerja toko, petani, pembantu rumah tangga, dan lain-lain. Namun ukuran pendapatan tersebut diatas setidaknya dijadikan standar penilaian penduduk pada garis kemiskinan.

3. Faktor Ketrampilan dan Keahlian .

Ketrampilan dan keahlian seseorang biasanya tidak didapat begitu saja melainkan

dapat diperoleh dari pendidikan dan ketrampilan khusus seperti kursus montir,kecantikan, tata boga,kemahiran dalam computer dan lain-lain . Ketrampilan dan keahlian seperti disebutkan diatas biasanya juga didapat dari berbagai sekolah kejuruan . Atau sebaliknya ketrampilan bisa saja didapat hasil pengalaman misalnya seorang pekerja dibengkel bertahun-tahun dan mendapatkan pengalamannya sehingga yang bersangkutan sudah mampu merakit atau memperbaiki sebuah mesin mobil sama seperti montir lainnya. Pengalaman juga akan sangat menentukan tingkat ketrampilan dan keahlian seseorang. Tetapi pengalaman seseorang yang didapat dari hasil observasi, atau belajar dari orang lain tanpa mengikuti pendidikan ketrampilan dan keahlian khusus memiliki wawasan yang sangat sempit bila dibanding dengan golongan penduduk yang mengikuti pendidikan dan ketrampilan pada bangku sekolah atau pada pendidikan kejuruan.

Bagi golongan masyarakat nelayan secara umum sangat minim dalam menguasai ketrampilan dan keahlian kecuali didapat dari hasil pengalaman. Minimnya ketrampilan dan keahlian secara langsung juga akan mempengaruhi besar kecilnya pendapatan . Pendapatan akan naik apabila ada pekerjaan yang dianggap sangat sulit untuk dikerjakan seperti contoh pekerja buruh bangunan,mampu membuat profil baik dari tiang beton, dinding, lantai, memasang tehel karena levelnya dia naik status menjadi pekerja buruh sebagai Bas bukan knek. Upah harian sebagai Bas dan Knek terdapat perbedaan. Montir mobil, dia mampu merevarasi mobil dengan memperbaiki kabel lampu, bongkar mesin, pekerja las, maupun dengan pengecatan. Pekerjaan seperti ini tentu membutuhkan ketrampilan dan keahlian khusus. Begitu pula dengan pekerjaan sebagai nelayan misalnya seorang nelayan memiliki ketrampilan untuk membuat perahu,

membuat jaring, memperbaiki jaring yang sudah rusak, membongkar mesin tempel dan lain-lain. Dengan demikian ketrampilan dan keahlian akan sangat menentukan miskin tidaknya seseorang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan ketrampilan dan keahlian bagi masyarakat nelayan dilokasi penelitian ternyata 95,00 % tidak memiliki ketrampilan dan keahlian.

4. Aspek Permodalan.

Modal biasanya merupakan salah satu asset dalam mengembangkan usaha, baik pekerja sebagai nelayan, buruh, petani dalam mengembangkan kewirausahaan semuanya akan membutuhkan modal. Faktor modal menjadi bagian terpenting dalam meningkatkan pengembangan usaha. Bagi orang miskin biasanya modal tidak menjadi penentu dalam memperoleh kesejahteraan ,sebab pendapatan yang didapat hanya cukup untuk makan dalam jangka waktu seminggu jadi sisa pendapatan selama seminggu akan habis dibelanjakan dalam keperluan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Bagi orang miskin sangat jarang diberikan modal terutama dari lembaga koperasi maupun lembaga perbankan,karena dalam memperoleh permodalan tentu akan membutuhkan persyaratan minimal seperti agungan dan berbagai kelayakan usaha. Orang miskin biasanya kurang tersentuh dengan berbagai kebijakan seperti bantuan permodalan. Bantuan yang diberikan hanya sebagai stimulan dalam mempertahankan berbagai pemenuhan kebutuhan pokok seperti membeli beras, membeli minyak tanah dan lain sebagainya. Oleh karena itu pemerintah dapat mensubsidi berbagai bantuan seperti BLT,Raskin, bantuan BBM dan lain sebagainya. Bantuan tersebut hanya sebagai penggerak dan perangsang dalam meningkatkan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Selain itu modal yang didapat dari

bantuan tersebut sangat kecil tidak dipakai untuk pengembangan program jangka panjang bagi rakyat miskin. Pemberian permodalan seperti ini biasanya akan menimbulkan rasa ketergantungan yang sangat besar terhadap pemerintah pada hal yang diharapkan dari pemberian bantuan adalah bertumbuhnya kewirausahaan golongan penduduk miskin untuk hidup secara mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 96,67 % masyarakat nelayan belum mendapatkan kesempatan dalam memperoleh aspek permodalan. Pada hal aspek permodalan akan turut menentukan pengembangan usaha bagi masyarakat nelayan.

C. Kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi masyarakat nelayan miskin.

Berdasarkan dari hasil evaluasi tentang program penanggulangan kemiskinan khususnya bagi masyarakat nelayan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagian besar belum memenuhi sasaran yang diinginkan. Pemberian bantuan yang diberikan seperti program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemberian beras miskin (Raskin) bukan merupakan salah satu jalan keluarga untuk mengatasi permasalahan bagi masyarakat nelayan miskin. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut akan berdampak pada besarnya ketergantungan masyarakat nelayan terhadap apa yang diberikan oleh pemerintah, oleh karena akan berdampak pada aspek pemenuhan kebutuhan kerja serta kesempatan kerja, masyarakat kalau diberikan insentif yang demikian akan merasa kurang bergairah dalam berusaha, namun yang diperlukan dalam hal ini adalah modal social yakni perlunya kesinambungan masyarakat nelayan dalam berusaha seperti perlu adanya organisasi nelayan yang mampu menghimpun serta memberikan bekal pengetahuan kepada

mereka agar kelak mereka setelah diberikan ketrampilan, bantuan permodalan maka mereka akan hidup mandiri serta tidak akan tergantung lagi kepada pemerintah.

Program-program terkait dengan masalah penanggulangan kemiskinan khususnya di Kecamatan Likupang barat hanyalah bersifat sementara sedangkan yang diperlukan bagi kesejahteraan dan masa depan masyarakat nelayan adalah program yang secara berkesinambungan, sehingga di perbaiki pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dengan memprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan nelayan secara berkesinambungan bukan menjadi target program antara.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Strategi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini secara faktual belum dapat mengangkat tingkat kehidupan dan taraf hidup bagi masyarakat nelayan. Program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat terhadap masyarakat nelayan hanyalah bersifat sementara dalam arti hanya untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak sementara program-program secara berkesinambungan belum dapat terealisasi.
2. Berbagai karakteristik yang turut mempengaruhi masalah kemiskinan bagi masyarakat nelayan antara lain disebabkan masih rendahnya tingkat pendidikan nelayan dimana berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar masyarakat nelayan memiliki latar belakang pendidikan SLTP. Dengan latar belakang pendidikan yang rendah tentu akan berdampak pada aktivitas bagi masyarakat nelayan.
3. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan nelayan antara lain : minimnya ketrampilan nelayan dalam penguasaan peralatan, kurangnya memperoleh permodalan, belum tersedianya lembaga yang menampung dan menghimpun masyarakat nelayan

dalam memperoleh wawasan dan pengetahuan terhadap bidang perikanan, sikap mental nelayan, pola hidup konsumtif serta kurangnya perhatian pemerintah.

B. Saran.

1. Kemiskinan merupakan masalah yang multidimensional sehingga pendekatan untuk mengentaskan kemiskinan juga harus multidimensional. Dalam hal mengatasi kemiskinan kaum nelayan, setidaknya perlu menggagas dan mewujudkan harapan akan perkuatan sektor kelautan dari semua aspek. Bagaimanapun juga bahwa penyebab kemiskinan tidaklah sama disemua wilayah, bahkan ukurannya pun bisa berbeda-beda atau tergantung kondisi setempat. Sehingga formula pengentasan kemiskinan pun tidak bisa digeneralisir pada semua wilayah atau semua sektor. Kemiskinan yang dialami oleh nelayan tidak bisa disamakan dengan ukuran kemiskinan buruh di perkotaan. Bahkan dalam suatu di kabupaten yang sama belum tentu bisa diratakan ukurannya pada desa-desa pesisir yang ada. Program pengentasan kemiskinan nelayan membutuhkan strategi khusus yang mampu menjawab realitas yang terjadi hari ini. Selain itu, peranan hukum juga menjadi sangat penting untuk mensejahterakan para nelayan.
2. Dalam usaha menanggulangi kemiskinan bagi masyarakat nelayan maka diperlukan berbagai strategi antara lain : (1) perlunya penciptaan lapangan kerja alternatif sebagai sumber pendapatan lain bagi keluarga, (2) mendekatkan masyarakat dengan sumber modal dengan penekanan pada penciptaan mekanisme mendanai diri sendiri (*self financing mechanism*), (3) mendekatkan masyarakat dengan sumber teknologi baru yang lebih berhasil dan berdaya guna, (4) mendekatkan masyarakat dengan pasar, serta (5) membangun solidaritas serta aksi kolektif di tengah masyarakat. Kelima pendekatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh aspirasi, keinginan, kebutuhan, pendapatan, dan

potensi sumberdaya yang dimiliki masyarakat bagi masyarakat nelayan.

3. Teknologi yang digunakan masyarakat nelayan, pada umumnya masih bersifat tradisional. Karena itu maka produktivitas rendah dan akhirnya pendapatan rendah. Melalui kesempatan ini diperlukan upaya meningkatkan pendapatan melalui perbaikan teknologi, yakni mulai dari teknologi produksi hingga pasca produksi dan pemasaran.
4. Perlunya pemberian bantuan berupa paket modal untuk pembelian peralatan seperti alat pendingin antara lain coolbooks serta alat pancing yang lebih canggih serta usaha motorisasi melalui paket kredit ringan tanpa agungan serta perlu mengevaluasi setiap nelayan yang layak diberikan permodalan.
5. Perlunya merubah pola kehidupan nelayan. Hal ini terkait dengan pola pikir dan kebiasaan. Pola hidup konsumtif harus dirubah agar nelayan tidak terpuruk ekonominya saat paceklik. Selain itu membiasakan budaya menabung supaya tidak terjerat rentenir. Selain itu perlu membangun diversifikasi mata pekerjaan khusus dipersiapkan menghadapi masa paceklik, seperti pengolahan ikan menjadi makanan, pengelolaan wilayah pantai dengan pariwisata dan bentuk penguatan ekonomi lain, sehingga bisa meningkatkan harga jual ikan, selain hanya mengandalkan ikan mentah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, Tessa . F. "*Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan dan Kemiskinan Aspek Sosial Budaya*". Draft Laporan Final Hibah Multidisiplin UI. 2009.
- Bayu Suryaningrat 1989, *Pengantar Ilmu Pemerintahan* CV Rajawali Jakarta.
- Chamber Robert, 1980, *Rural Poverty Unperceived, Problem an Remedies*, World Bank , Staf Working Paper No. 400 New York.
- ,1981, *Pembangunan Desa*,LP3ES Jakarta

- Dick-Read, Robert. " *Penjelajah Bahari: Pengaruh Peradaban Nusantara di Afrika*". Bandung: Mizan 2008
- Fadel Muhamad 2009, *Kertas Kerja Kementerian Perikanan dan Ilmu Kelautan*
- Handayaniingrat Soerwarno, 1982, *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Sosial*, CV. Haji Masaagung, Jakarta
- Hoogerwerf 1983, *Ilmu Pemerintahan*, Penerbit Pradnya Paramita.
- Kartasmita Ginandjar , 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat, (Memadukan Pertumbuhan dan Perencanaan)*, Jakarta, PT. Pustaka Sidesindo
- Kusnadi, 2005 *Akar Kemiskinan Nelayan*". Yogyakarta. LKIS. 2002
- Miriam Budiardjo 1996, *Partisipasi Politik*, PT Gramedia Jakarta.
- Mulandari, Surya dan Thamrin, 1996, *Dehumanisasi Anak Marginal Berbagai Pengalaman Pemberdayaan*, Bandung, Yayasan Akatiga Gugus Analisa
- Suharto, Edi. " *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*". Bandung: Refika Aditama. 2005.
- Suharto, Edi, *Kebijakan Sosial sebagai kebijakan public*, Alfabeta, Bandung, 2007
- Sugiyono, 2002, *Metodologi Penelitian Sosial*, Alfabeta Bandung.
- Prijono, Onny S., dan A.M.W. Pranarka, (ed.), *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: CSIS, 1996
- Suparyogo, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pradnya Paramita.
- Solihin, Akhmad. " *Musim Paceklik Nelayan dan Jaminan Sosial*".
- Sudrajat, Ihwan. " *Membangkitkan Kekuatan Ekonomi Nelayan*". Suara Merdeka, 13 Desember 2002.
- _____. 2006, " *Separuh Penduduk Masih Rentan Menjadi Miskin*", Kompas, 8 Desember.
- Soetrisno Lukman, 1997, *Kemiskinan Perempuan dan Pemberdayaan*, Kanisius Yogyakarta.
- Kershaw Joseph, 1970, *A Government Against Poverty*, Markham Publishing Company, Chicago.
- Levitan SarA 1976, *Problem in Aid or the Poor*, The John Hopkins Univeersity Press, Baltimore
- Sackrey Charles, 1973, *The Political economy of Urban poverty* W.W. norton and Company, New York.
- Waxman, Chaim Issac 1977, *The Stigma of Poverty Acritique of Poverty Theories and Policies*, Pergamon Press Inc
- Nasikun 2003, *Paradigma Pembangunan di Indonesia*, LP3ES.
- Mubyarto, *Petani Desa dan kemiskinan BPFE* Yogyakarta.
- W.J.S. Poerwadarminta ,1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka Nasional.

Sumber-sumber lain :

- BPS, 2008 pada tanggal 6 Juli 2011
- APBN tahun 2011